

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (ABD) DI
SELURUH KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

Beauty Alexandra M.

12080631

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta wacana

Yogyakarta

2014

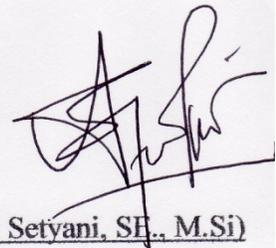
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusunan : Beauty Alexandra Meirisha
Nomor Induk Mahasiswa : 12080631
Fakultas/Jurusan : Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI
BELANJA DAERAH (ABD) (Studi Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta)**
Tahun Ajaran : 2013/2014

Telah Diperiksa dan Disetujui di Yogyakarta

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing,



(Astuti Yuli Setyani, SH., M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (ABD) DI SELURUH KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TELAH DIAJUKAN DAN DIPERTAHANKAN OLEH :

Nama Penyusunan : **Beauty Alexandra Meirisha**

Nomor Induk Mahasiswa : **12080631**

Dalam ujian Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tanggal **20 MAY 2014**

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Maharani Dhian Kusumawati, SE., M.Sc

2. Dra. X.Indri Prasasyaningsih SE, MSi

3. Astuti Yulisetyani SE, MSi, Ak

Yogyakarta, **05 JUN 2014**

Disahkan Oleh:

Dekan,



Dr. Singgih Santoso, MM

Wakil Dekan 1 Akuntansi,

Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (STUDI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN/KOTA ISTIMEWA YOGYAKARTA) yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagai syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiat atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenakan sanksi yakni pencabutan gelar sarjana saya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014



(Beauty Alexandra Meirisha)

12080631

MOTTO

Harapan yang mampu membuat kita terus berjuang. Hadirnya harapan-harapan baru akan terus melahirkan visi-visi yang baru agar tetap bertahan hidup.

Apa yang sudah dikerjakan lakukan dengan sepenuh hati dan keikhlasan karna dengan melakukan yang terbaik di hari ini belum tentu biasa kita lakukan di esok hari.

©UKDW

PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si. Selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk, serta semangat kepada saya dalam penyusunan laporan ini.
2. Keluarga penulis tercinta, Papa, Mama, Mas Poggy, Mbak Dhika serta ponakanku yang imut Aray. Terima kasih untuk segala bentuk kasih, doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan untuk penulis dalam menyusun laporan ini. (Aku mengasihi kalian semua)
3. Mas pacar Roni yang selalu menyemangati dan selalu mendoakan agar selalu dapat acc biar cepet ujian, walaupun dengan kesibukan yang padat merayap selalu memberikan semangat untukkuu
4. Untuk para sahabat Ladies Valent, Yolanda, Debby, Witur, Ayi kalian inspirasi yang luar biasa, semangat yang tidak terkira untuk menyelesaikan skripsi ini, kalian menjadi contoh untuk aku berjuang demi mendapatkan gelar yang lebih tinggi, kalian ga pernah capek untuk ngingetin aku ngerjain skripsi. Walaupun kita jarang ngumpul lagi tetapi terimakasih untuk semua waktu kalian sodara-sodaraku
5. Untuk teman-teman angkatan 2008 terimakasih juga untuk waktu kalian yang membantu sekali dalam pengerjaan ini dan kalian selalu memberi arahan yang baik dalam penyusunan ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan selama penyusunan laporan ini

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembaca, dan apabila terdapat salah kata dalam penyusunan laporan dan pembuatan Skripsi ini, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Penulis

©UKDW

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasihNya maka penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI Berjudul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Laporan SKRIPSI ini dibuat untuk pemenuhan atas tugas yang merupakan syarat untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam penyusunan laporan dan pembuatan SKRIPSI Ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingan yang selama ini telah diberikan oleh:

1. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si. Selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk, serta semangat kepada saya dalam penyusunan laporan ini.
2. Keluarga penulis tercinta, Papa, Mama, Mas Poggy, Mbak Dhika serta ponakanku yang imut Aray. Terima kasih untuk segala bentuk kasih, doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan untuk penulis dalam menyusun laporan ini. (Aku mengasihi kalian semua)
3. Mas pacar Roni yang selalu menyemangati dan selalu mendoakan agar selalu dapet acc biar cepet ujian, walaupun dengan kesibukan yang padat merayap selalu memberikan semangat untukku
4. Untuk para sahabat Ladies Valent, Yolanda, Debby, Witur, Ayi kalian inspirasi yang luar biasa, semangat yang tidak terkira untuk menyelesaikan skripsi ini, kalian menjadi contoh untuk aku berjuang demi mendapatkan gelar yang lebih tinggi, kalian ga pernah capek

untuk ngingetin aku ngerjain skripsi. Walaupun kita jarang ngumpul lagi tetapi terimakasih untuk semua waktu kalian sodara-sodaraku

5. Untuk teman-teman angkatan 2008 terimakasih juga untuk waktu kalian yang membantu sekali dalam pengerjaan ini dan kalian selalu memberi arahan yang baik dalam penyusunan ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan selama penyusunan laporan ini

Dalam penyusunan laporan dan pembuatan program ini penulis juga menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis dengan senang hati akan menerima saran dan kritik.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembaca, dan apabila terdapat salah kata dalam penyusunan SKRIPSI ini, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kontribusi Penelitian.....	9
1.5 Batasan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Otonomi Daerah.....	11
2.1.1 Nilai Unitaris.....	11
2.1.2 Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial.....	11

2.2 Pendapatan Asli Daerah	12
2.2.1 Hasil Pajak Daerah.....	14
2.2.2 Hasil Retribusi Daerah.....	15
2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15
2.2.4 Lain-lain PAD yang Sah	16
2.3 Dana Alokasi Umum	17
2.4 Alokasi Belanja Daerah	19
2.4.1 Definisi Belanja Daerah	19
2.4.2 Klasifikasi Belanja Menurut Jenisnya	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
3.1.1 Belanja Daerah	29
3.1.2 Pendapatan Asli Daerah	30
3.1.3 Dana Alokasi Umum	30
3.2 Data Penelitian	30
3.3 Desain Penelitian	32
3.4 Metode Analisis	32
3.4.1 Statistik Deskriptif	33
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	33
a. Uji Normalitas	33
b. Uji Multikolinearitas	34
c. Uji Autokorelasi	35
d. Uji Heteroskedastisitas	36

e. Model regresi	36
f. Uji Hipotesis	37
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
4.2 Uji Asumsi Klasik Variabel Dependen Biaya Tidak Langsung	42
4.2.1 Uji Normalitas	42
4.2.2 Uji Multikolinearitas	44
4.2.3 Uji Autokorelasi	44
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas	45
4.3 Uji Asumsi Klasik Variabel Dependen Biaya Langsung	46
4.3.1 Uji Normalitas	47
4.3.2 Uji Multikolinearitas	48
4.3.3 Uji Autokorelasi	49
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	49
4.4 Hasil Analisis Linier Berganda	51
4.4.1 Belanja Tidak Langsung	51
4.4.2 Belanja Langsung	54
4.5 Pembahasan Hipotesis	57
4.5.1 Alokasi Belanja Langsung	57
4.5.2 Alokasi Belanja Tidak Langsung	58
4.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah	59
4.7 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah	61
BAB V PENUTUP	63

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

©UKDW

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Analisis Deskriptif	41
Tabel 4.2	Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi	45
Tabel 4.4	Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.5	Uji Autokorelasi	49
Tabel 4.6	Koefisien Ditermenasi	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi	52
Tabel 4.8	Uji t	53
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi	55
Tabelr 4.11	Uji t	56

©UKYDIN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Uji Normalitas (Belanja tidak langsung).....	43
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas	46
Gambar 4.3	Uji Normalitas (Belanja Langsung)	47
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas	50

©UKDW

ABSTRAKSI

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyelenggaraan desentralisasi demi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam melaksanakan upaya peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah dan keberhasilan sistem desentralisasi, perlu diadakan penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD). Penelitian ini menggunakan sampel 5 daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2010 hingga 2013. Metode pengambilan sampel menggunakan sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh terhadap ABD

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Belanja Daerah (ABD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen organisasi. Oleh karena itu, anggaran memiliki posisi yang penting sebagai tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Menurut *Governmental Accounting Standart Board* (GASB) yang dulu dikenal dengan sebutan *National Comittee on Governmental Accounting* (NCGA), anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan dalam jangka waktu tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan di dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD tersebut harus memiliki dasar hukum. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk

melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan anggaran daerah pasca UU. Nomor 22 Tahun 1999 telah direvisi menjadi UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penyusunan tersebut melibatkan dua pihak yaitu, Badan Eksekutif dan Badan Legislatif melalui sebuah tim dan panitia anggaran daerah. Badan eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat rancangan APBD yang diimplementasikan jika telah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara badan eksekutif dan badan legislatif tentang kebijakan umum, prioritas, dan landasan anggaran sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran. Badan eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pembiayaan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi juga terdapat dalam APBD.

Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber dana tersebut dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 tentang Perimbangan Dana, sumber dana pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Penerimaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sumber dana bagi daerah seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Sektor pendapatan daerah memiliki peranan yang penting karena dapat menjadi tolak ukur sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya sendiri.

Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak daerah, tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah ketergantungan, dan jumlah personil.

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dengan indikator meningkatnya PAD dan berkurangnya DAU atau subsidi dari pusat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD antara lain, intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah

dalam bentuk retribusi dan pajak, eksplorasi sumber daya alam, skema pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

Keterkaitan antara desentralisasi dan PAD yang paling realistis adalah bahwa desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi yang cepat di tingkat daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD secara lebih maksimal.

Seiring meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat pula. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Era otonomi membuka kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk membiayai belanja daerah melalui PAD yang dihasilkan.

Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri. Hal ini dapat dilihat melalui pertumbuhan PAD yang semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi PAD tersebut terhadap belanja daerah.

Isu utama dari PAD yang dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa PAD merupakan cerminan dari kemampuan pajak daerah (*local taxing power*). Menurut sebagian pihak cerminan tersebut cukup signifikan besarnya. Tetapi,

pengalaman menunjukkan bahwa PAD Kabupaten dan Kota secara umum hanya memiliki peranan yang marginal terhadap APBD.

Otonomi daerah tidak hanya membawa dampak positif dalam memunculkan identitas daerah yang ada di masyarakat. Otonomi daerah juga membawa dampak negatif dengan munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya lebih tinggi dibanding dengan daerah yang masih berkembang.

Oleh karena itu, otonomi daerah tetap membutuhkan peran pemerintah pusat dalam pemberian dana bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pada pemerintah daerah. Pada prakteknya, pemberian dana dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama di beberapa pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam perhitungan anggaran. Tujuan dari pemberian dana tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dan pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peran dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan potensi fiskal dan kebutuhan dari masing-masing daerah.

Terdapat permasalahan pada pemberian dana alokasi umum. Permasalahan timbul ketika pemerintah daerah meminta dana alokasi umum kepada pemerintah pusat sesuai kebutuhannya, tetapi belum dapat diberikan karena dasar perhitungan kebutuhan fiskal yang tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya data, belum adanya standar pelayanan minimum masing-masing daerah, sistem penganggaran yang tidak berdasarkan pada standar analisis belanja, dan total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya sehingga tidak efisien.

Sumber-sumber pendapatan daerah baik itu PAD dan DAU diperoleh dan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar. Belanja daerah juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui untuk mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, dimaksudkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran (Memesah, 1995). Tindakan untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber ekonomi antara lain berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Uang tersebut digunakan untuk keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan.

Menurut Maemunah (2006) ada lima hal penyebab pengeluaran pemerintah terus meningkat, antara lain, adanya tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan tidak efisiennya birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Pendanaan belanja daerah menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten dan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Penanganan urusan-urusan tersebut dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah terbagi menjadi dua tipe yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Menurut Halim (2009), belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Berkaitan dengan belanja daerah, Bappenas (2003) mengatakan kontribusi PAD merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah dalam Widjaja (2003) mengungkapkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah merupakan salah satu variabel pokok untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi. Variabel-variabel pokok tersebut adalah kemampuan keuangan daerah, jumlah penduduk, partisipasi masyarakat, variabel ekonomi dan variabel demografi. Oleh karena itu, daerah otonom cenderung lebih mengandalkan sumber penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan pinjaman daerah.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Nur Indah (2010) tentang Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah memperoleh hasil yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Alokasi

Belanja Daerah. Penelitian Darwanto Yulia Yustikasari (2007) juga memperoleh hasil yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara signifikan berpengaruh terhadap besar kecilnya variabel belanja modal.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, penulis mengidentifikasi dan menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Alokasi Belanja Daerah khususnya dalam periode tahun 2010-2013.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain:

- a. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal menyusun kebijakan anggaran daerah di masa yang akan datang
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan data tambahan bagi penulis lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini
- c. Menambah pengetahuan dalam studi ilmu ekonomi khususnya di Universitas Kristen Duta Wacana

1.5 Batasan Penelitian

- a. Penulis membatasi penelitian ini pada dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
- b. Penulis memulai penelitian ini pada tahun 2010 dan diakhiri tahun 2013

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah. Pemerintah daerah memiliki PAD yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga tinggi
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah. Pemerintah daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga tinggi.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan Alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus mengupayakan untuk menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih.

Dan mungkin mengambil jangkauan lebih luas selain kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintahan, atau kondisi makro-mikro.
4. Menambah dan mempertimbangkan dalam menentukan variabel bebasnya.

©UKYDIN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- “Dana Alokasi Umum,” dalam <http://www.djpk.depkeu.go.id/links/go/175/>, diakses pada 23 Januari 2014
- “Dana Alokasi Umum,” dalam <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4425/DanaAlokasiUmum.htm>, diakses pada 23 Januari 2014
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah. Edisi 4. Penerbit BPEE: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta. Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. Akuntansi Sektor Publik
- Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kawedar, Warsito dan Sri Handayani. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit UNDIP: Semarang
- Maimunah, Mutiara. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mamesah,D.K.,1995, “Sistem Administrasi Keuangan Daerah”. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- “Otonomi Daerah di Indonesia,” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia, diakses pada 23 Januari 2014

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol 08 No 2.

“Pendapatan Asli Daerah,” dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>, diakses pada 23 Januari 2014

Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Prediksi Belanja Daerah pada Kabupaten Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta

Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Rahmawati, Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sekaran, Uman. 2002. Research Method fo Business: A Skill Building Approach, 7th Edition. New York: John Wiley and Sons.

Singgih, Santoso. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Setiawan, Anjar. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Studi Pada Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro.

“Sistem Ekonomi dan Otonomi di Indonesia” dalam <http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1000/bab2.pdf?sequence=4>

Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, H. Suheiry Zein, H. Azrafiany A.R. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya. Malang: Bayumedia

Sukriy dan Halim Abdullah (c), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Triwidodo, Pambudi. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 19 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Wijaya, Tony. 2011. Cepat Menguasai SPSS 19 untuk olah dan interpretasi, data penelitian dan skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

©UKDW